

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yeremia Fernando Parengkuan  
NPP. 30.1268  
*Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah*  
*Program Studi Kebijakan Publik*  
Email: yeremia290801@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si

## ABSTRACT ( in english )

**Problem Statement/Background (GAP):** Literacy is a person's skill to maximize all his potential and abilities, so the definition of literacy includes a person's skills in processing and interpreting information when doing reading and writing activities. Palu City as the capital of Central Sulawesi province is still unable to strive for literacy levels for its people, even though the Palu City government itself already has a regional regulation, namely Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Library Implementation. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the supporting and inhibiting indicators as well as the efforts of the Archives and Library Office in increasing reading interest through the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Library Implementation in Palu City. **Method:** The method used in this study is qualitative with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. **Result:** Based on the results of the study, the Archives and Library Office currently has good facilities and infrastructure so that it can provide a sense of comfort to the community by providing digital reading corners and mobile libraries and has collaborated with urban villages in Palu City through a library transformation program based on social inclusion. **Conclusion:** And the lack of regional regulations on library implementation does not yet have a derivative policy that is applicable so that it has not been directed what must be done to increase reading interest, lack of personnel, stigma related to the Archives and Library Service as an "outcast" service, and also the development of digitalization.

**Keywords:** Implementation, Literacy, Library

## ABSTRAK ( in bahasa )

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Literasi ialah keterampilan seseorang untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan dirinya, sehingga definisi literasi meliputi keterampilan seseorang dalam memproses dan memaknai suatu informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah masih belum mampu dalam mengupayakan tingkat literasi bagi masyarakatnya, padahal pemerintah Kota Palu sendiri sudah memiliki peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui indikator pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Palu. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saat ini memiliki sarana dan prasana yang baik sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan menyediakan pojok baca digital dan juga perpustakaan keliling serta telah bekerjasama dengan kelurahan di Kota Palu melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. **Kesimpulan:** Dan kekurangannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan belum memiliki kebijakan turunan yang bersifat aplikatif sehingga belum terarah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca, kurangnya jumlah personil, stigma terkait Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai dinas “buangan”, dan juga perkembangan digitalisasi. **Kata kunci:** Implementasi, Literasi, Perpustakaan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Literasi ialah keterampilan seseorang untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan dirinya, sehingga definisi literasi meliputi keterampilan seseorang dalam memproses dan memaknai suatu informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Oleh sebab itu, literasi merupakan salah satu hal vital untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu demi memajukan suatu negara, sebab apabila manusia mempunyai kebiasaan dalam giat literasi maka wawasan dan ilmu yang dimiliki akan semakin luas sehingga menciptakan SDM yang kreatif, inovatif, serta kritis dan juga dapat mengolah informasi dengan baik yang kemudian dapat diterapkan dalam mengambil keputusan maupun dalam menciptakan hal-hal baru.

Di Sulawesi Tengah tingkat literasi masyarakat masuk dalam kategori rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) yang dipublikasikan oleh perpustakaan menyatakan, Sulawesi Tengah berada di urutan ke-30 dari 34 provinsi dalam tingkat kegemaran baca masyarakat. Hasil survei Perpustakaan Nasional menyatakan tingkat gemar membaca provinsi Sulawesi Tengah berada pada angka 56.33 yang berada pada kategori sedang namun hal ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain melihat dari jumlah bacaan, frekuensi membaca dan durasi membaca sesuai dengan pengukuran yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional. Disisi lain BPS menyebutkan Sulawesi Tengah melek membaca (buta aksara) berada pada posisi terendah yaitu 37 persen dari rata-rata usia 12 sampai dengan 37 tahun. Berikut data yang dipublikasikan oleh perpustakaan terkait tingkat minat baca secara nasional di Indonesia.

Kemendikbud RI menyatakan dari Indeks Aktifitas Membaca (Alibaca) bahwa dasar penyebab dari rendahnya animo baca penduduk Indonesia timbul dari beberapa faktor, antara lain; kurangnya akses untuk bahan literasi dimana buku-buku yang disediakan adalah buku-buku lama yang sudah tidak pernah diperbaharui lagi, sarana dan prasana membaca yang kurang diperhatikan seperti gedung perpustakaan yang sudah harus di renovasi kembali sampai kenyamanan perpustakaan yang sudah kurang memadai bagi masyarakat sehingga menyebabkan ketidaktertarikan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan, interaksi dan pembiasaan orangtua terhadap anak usia dini tentang pentingnya literasi, kualitas guru yang masih rendah, perkembangan media informasi dan teknologi yang begitu cepat saat ini sehingga mengalihkan anak-anak dari ketertarikan dalam membaca. (Kemendikbud, 2019)

Kota palu merupakan salah satu kota yang terkategori tingkat literasi rendah di Sulawesi tengah, sebagai ibukota provinsi pemerintah kota palu belum mencapai hasil yang maksimal dalam mengupayakan tingkat literasi bagi masyarakatnya, padahal pemerintah Kota Palu sendiri sudah memiliki peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, pada pasal 8 ayat 1 huruf a dan b menyatakan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah dan menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan data yang diberikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan per tahun 2020 mengalami gejolak penurunan, terlihat kunjungan paling banyak berada dibulan maret dengan jumlah 226 pengunjung dalam satu bulan, jumlah ini dapat dikatakan cukup rendah bila dilihat dari jumlah penduduk Kota Palu yang berjumlah 372.113 jiwa, akan tetapi penurunan ini diakibatkan oleh dampak dari penyebaran virus covid-19 pada tahun tersebut sehingga merupakan hal yang wajar. Melihat data diatas menunjukkan bahwa minat literasi masyarakat masih rendah, data pengunjung yang sedikit ini disebabkan bahan pustaka yang tidak lengkap sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tingkat kenyamanan bangunan atau tempat baca yang belum memenuhi standar layanan baca perpustakaan. Di mana tempat baca masih dalam kondisi panas karena tidak memiliki pendingin ruangan termasuk keberadaan gedung yang tidak strategis untuk dikunjungi, kemudian jumlah pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu masih sangat sedikit dan juga ada yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki pegawai sehingga pengelolaan perpustakaan belum dapat dijalankan dengan baik karena pegawai yang ada kewalahan bahkan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, oleh sebab itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dapat dikatakan belum memenuhi standar Perpustakaan Nasional yang diatur pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota menyatakan, lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, kemudian gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien, serta gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi perpustakaan yang ada di Kota Palu sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sarana dan prasana perpustakaan Kota Palu yang belum memadai, serta sumber daya manusia nya masih sangat minim. dengan demikian, akar permasalahan dari rendahnya tingkat literasi di Kota Palu ialah rendahnya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca oleh pemerintah, kurangnya penyediaan sarana dan prasana perpustakaan bagi masyarakat,

kurangnya jumlah pegawai yang ada, serta perkembangan globalisasi, teknologi dan penggunaan media sosial yang melengserkan budaya literasi bagi masyarakat di Kota Palu.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Peraturan Daerah maupun konteks, meningkatkan literasi masyarakat. Penelitian pertama dilakukan Dwi Yuni Kartikasari, Weni Rosdiana (2018) dengan judul “Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan” hasil penelitiannya implementasi program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) berjalan kurang maksimal, hal ini didasarkan dari standar, dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilakukan pemantauan, akan tetapi masih adanya Buku yang rusak, hilang, serta masyarakat yang tidak mengembalikan buku karena tidak ada sanksi apabila buku hilang dan sebagainya.

Selanjutnya oleh Bakhtiyar (2019) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Prima Perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur” hasil penelitiannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dapat dikatakan cukup baik dilihat dari beberapa faktor yakni SDM yang terqualifikasi, otomasi perpustakaan, koleksi perpustakaan, fasilitas maupun sarana prasarana yang cukup lengkap.

Berikutnya oleh Revo Prambudi Adha, Hendri Koeswara, Desna Aromatica (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat” hasil penelitiannya Implementasi dan kinerja kebijakan perpustakaan di Kota Padang dalam meningkatkan minat baca masyarakat belum berjalan secara optimal, kendala yang ditemukan terdapat pada pembagian kerja pegawai yang belum sesuai keahlian yang dimiliki, keterbatasan anggaran, serta pola pikir masyarakat.

Selanjutnya oleh Kamulyan, Mulyadi Sri, and Febriana Primasari (2016) dengan judul “implementasi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa” hasil penelitiannya Berdasarkan diskripsi data dan laporan pada bab sebelumnya, manfaat perpustakaan sebagai sumber belajar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada SDN Tunggulsari 1 No. 72 Laweyan namun perpustakaan sampai saat ini belum digunakan sebagai sumber belajar karena ada beberapa penyebabnya yaitu; (1) Pengelolaan perpustakaan yang kurang mendapat perhatian dari pihak sekolah, sehingga dengan semua itu memunculkan kurangnya minat siswa berkunjung, (2) Keberadaan perpustakaan yang kurang mendukung kebutuhan siswa sehingga pelaksanaan perpustakaan sekolah menjadi sepi peminatnya, (3) Peran guru juga masih terbatas, guru hanya sekedar mengarahkan kepada siswa belum memberikan contoh tindakan secara nyata, (4) Keterbatasan waktu di sekolah juga mengakibatkan siswa enggan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar serta rendahnya siswa dalam melakukan aktivitas di perpustakaan, (5) Koleksi buku yang kurang mendukung proses pembelajaran.

Dan yang terakhir Widiyaningrum, Widdy Yuspita (2020) dengan judul “pengaruh implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh dinas arsip dan perpustakaan terhadap peningkatan pelayanan perpustakaan di kabupaten bandung” hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dan penerapannya terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan berkriteria kuat/valid, dan akan lebih mewujudkan kinerja para pelaksana kebijakan yang optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan perpustakaan yang diberikan pada masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan penggunaan instrumen secara konsisten pengukuran kinerja pelayanan secara jujur dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat, di samping diperlukannya suatu dokumen yang

dinamakan citizen's charter yang digunakan oleh providers maupun customers sebagai acuan guna mejamin implementasi kebijakan yang prima.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah lokus penelitian juga berbeda dengan yang dilakukan Dwi Yuni Kartikasari, Bakhtiyar, Revo Prambudi Adha Hendri Koeswara, Mulyadi Sri, Widiyaningrum, Widdy Yuspita dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Thomas R.Dye (2017) dimana dalam mengukur keberhasilan implementasi diukur melalui 4 indikator yaitu organisasi pelaksana, pedoman/aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa indikator pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Palu. Dan menganalisis upaya apa yang sudah dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dalam meningkatkan minat baca masyarakat melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Palu.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam menjelaskan data yang disediakan. Adapun penelitian kualitatif datanya berupa penjelasan atau pernyataan bukan bersifat numerik. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (Sugiyono 2016). Triangulasi sendiri ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari sudut pandang yang berbeda, dengan demikian maka metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan melakukan observasi terkait kebijakan yang ada dilapangan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menilai variabel tanpa membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lainnya. Peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang pembinaan, kepala sub bagian perencanaan program, kepala sub kepegawaian dan umum, serta staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, serta beberapa masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Thomas R.Dye yang menyatakan dalam implementasi kebijakan terdapat 4 indikator dalam menentukan keberhasilannya, yaitu; organisasi pelaksana, pedoman/aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis apa faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan di kota palu provinsi sulawesi tengah menggunakan pendapat Thomas R.Dye yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi, yaitu organisasi pelaksana, pedoman/aturan, ketersediaan personil dan sumber daya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan peneliti ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan perpustakaan antara lain:

##### **A. Organisasi Pelaksana**

tugas pokok serta fungsi seluruh pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berdasarkan perintah Walikota sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Hal tersebut merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Palu. Selanjutnya fungsi untuk menyediakan perpustakaan merupakan fungsi dari sub bidang bagian perencanaan dan program. Berdasarkan kejelasan fungsi sub bidang perencanaan dan program diatas, peneliti memahami bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan merupakan fungsi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Kejelasan fungsi tersebut merupakan hal yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut, karena pelaku implementasi kebijakan tersebut harus memahami kejelasan fungsinya. Yang terakhir dalam proses implementasi kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan dengan pihak lain. Dalam penyelenggaraan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bekerjasama dengan pihak-pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat khususnya anak-anak sekolah, sebab penanaman gemar membaca harus dimulai sejak usia dini sehingga dapat tertanam dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk membaca.

##### **B. Pedoman atau aturan**

kejelasan arah dari kebijakan penyelenggaraan perpustakaan adalah menjadikan masyarakat yang gemar membaca melalui perpustakaan, akan tetapi peraturan tersebut masih bersifat umum sehingga belum lebih terperinci untuk penerapannya di Kota Palu. kekurangan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan terdapat pada peraturan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara terperinci bagaimana penerapan yang harus dilakukan khususnya di Kota Palu mengingat setiap karakter masyarakat di tiap daerah berbeda-beda, sehingga harus melakukan pendekatan yang tepat agar mampu menarik minat baca masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

##### **C. Ketersediaan Personil**

jumlah personil yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berjumlah 73 orang, jumlah ini menurut beliau masih tergolong sangat sedikit sebab masih ada sub bagian yang bahkan tidak memiliki staf, hal ini dikarenakan kurangnya orang yang mendaftar untuk menjadi pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan juga stigma bahwa perpustakaan merupakan tempat buangan

bagi pegawai yang menyebabkan kurangnya pegawai yang mau bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan karena pegawai yang ada masih belum mampu untuk memberikan pelayanan secara maksimal karena berjumlah sedikit dari jumlah yang dibutuhkan, kurangnya pegawai ini karena pola pikir pegawai yang menganggap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas yang kurang penting dan bahkan pekerjaannya tidak mampu menghasilkan penghasilan yang cukup, oleh sebab itu pemerintah Kota Palu harus segera membenahi hal ini karena ini menjadi permasalahan pokok dalam Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Kemudian kualitas dari segi keterampilan dan pengalaman individu belum memadai karena pegawai yang ada bukan orang-orang yang telah melalui assessment dan pelaksanaan analisis jabatan yang kurang tepat, sebab kebiasaan yang masih ada yaitu bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas buangan sehingga kebiasaan yang muncul yaitu apabila ada pegawai yang bermasalah pada dinas sebenarnya akan dimutasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hal ini sangat disayangkan karena pada akhirnya pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bukan orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, ditambah lagi karena hal tersebut kedisiplinan pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu menjadi kurang baik mulai dari datang terlambat ke kantor atau tidak dapat melayani secara tulus kepada masyarakat.

#### **D. Sumber Daya**

Melihat secara langsung gedung layanan dan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan peneliti memahami bahwa sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai hanya saja sarana dan prasarananya baru saja dikerjakan terutama gedungnya yang baru, oleh karena itu pengerjaannya masih dalam proses sehingga pelayanan yang diberikan belum bisa secara maksimal pada saat ini, namun penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

### **3.2. Upaya Untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Palu Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Palu**

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan peneliti mendapati bahwa upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dalam meningkatkan minat baca ialah mulai dari penyediaan pondok baca digital di tiap titik keramaian, perpustakaan keliling, renovasi gedung perpustakaan, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah, serta kegiatan bersama pegiat literasi untuk membuat kegiatan sosialisasi terkait pentingnya literasi, kami juga bekerjasama dengan seluruh kelurahan di Kota Palu untuk penguatan literasi masyarakat untuk memenuhi informasi bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Terdapat hambatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dimana Stigma pegawai bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas “buangan” sehingga pegawai tidak memiliki ketertarikan untuk ditempatkan di dinas tersebut, kemudian dalam penerimaan pegawai dinas ini pelaksanaan analisis jabatan kurang sesuai karena pegawai yang ada rata-rata tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini karena pegawai yang ditempatkan tidak berdasarkan keinginan maupun seleksi yang tepat, hanya

berdasarkan mutasi karena bermasalah pada dinas sebelumnya ataupun karena dipindahkan oleh pimpinan. Ini merupakan salah satu temuan yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kendalanya selalu pada sarana dan prasarana maupun terkait anggaran, oleh sebab itu hal ini patut untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Palu dengan melakukan pembinaan terhadap pegawai terkait stigma “buangan” bila ditempatkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu sehingga pegawai dapat bekerja secara antusias dan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan pelayanan dengan baik, selain pembinaan pemerintah Kota Palu dapat juga menyeleksi lebih teliti lagi terkait pegawai yang akan bekerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui assessment analisis jabatan agar pegawai yang ada mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan dikerjakan oleh orang-orang yang berkompoten pada bidangnya dan menghasilkan hasil yang maksimal.

#### IV. KESIMPULAN

Penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan tersebut ialah ketersediaan personil yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih sangat kurang sehingga belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena stigma pegawai bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas “buangan” sehingga pegawai tidak memiliki ketertarikan untuk ditempatkan di dinas tersebut, kemudian dalam penerimaan pegawai dinas ini pelaksanaan analisis jabatan kurang sesuai karena pegawai yang ada rata-rata tidak memiliki kompeten yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini merupakan salah satu penghambat yang harus segera dihilangkan karena sejatinya setiap dinas merupakan unsur penting dalam memajukan Kota Palu terlebih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dibidang literasi dalam bentuk buku cetak maupun digital, dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhusus yang berada di Kota Palu. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini belum memiliki kebijakan turunan yang menjadi kebijakan *aplikatif* atau kebijakan yang secara langsung mengatur program-program kegiatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Palu, sebab Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini masih bersifat umum sehingga belum secara terperinci berbicara tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca khusus nya di Kota Palu, karena pendekatan tiap daerah itu berbeda-beda sehingga harus disesuaikan dengan masyarakat Kota Palu agar mampu menarik minat masyarakat untuk membaca. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat, melalui kebijakan penyelenggaraan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengadakan beberapa program seperti penyediaan pondok baca digital, perpustakaan keliling, pengadaan perpustakaan sekolah, dan juga kerjasama dengan seluruh kelurahan, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau yang disebut dengan TPBIS.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan di kota palu provinsi sulawesi tengah untuk menemukan hasil yang lebih dalam.



## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu beserta jajarannya dan salah satu wilayah kelurahan di Kota Palu yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Damaradi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy 14th Edition*. 368. PEARSON [www.pearsonhighered.com](http://www.pearsonhighered.com)
- , (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Method*. Kuningan. Hidayatul Quran Kuningan
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Kemendikbud. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*: Jakarta: Puslitjakbud.
- Lasa, H. S. (2005). *Manajemen perpustakaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Matthew Miles, Michael Huberman, Johny Saldana. 2014, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, California: SAGE Publications, Inc
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono, Trimo. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan*. Bandung: Remaja Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

### C. Jurnal/Skripsi

- Adha, R. P., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Implementation of Regional Library Policy. *Jurnal Kebijakan Publik*, xx(X), 33–38.
- Arya, D., Silvana, H., & -, D. (2015). The Policy of Principals Regarding the Implementations of Library School in Bandung City. *Record and Library Journal*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20473/rlj.v1i1.79>
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An Analytic Approach for Discovery. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Goody, J. (Ed.). (1975). *Literacy in traditional societies*. Cambridge University Press.
- Griffin, S. M. (1999). Digital Libraries Initiative–Phase 2: Fiscal Year 1999 Awards. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 26(1), 14-21.
- Kartikasari, D. Y., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kamulyana, M. S., & Primasari, F. (2016). Implementasi Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Profesi Pendiidikan Dasar*, 1(1), 17-30
- Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Studi pada Program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) di Kabupaten Gresik). *Publika*, 6(4).
- No, K. (2022). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. 20. <http://diskarpus.org/index.php/hal/tampil/3/Visi-Dan-Misi>
- Pradipta, W., Rostyaningsih, D., & ... (2015). Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy* .... <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10315>
- Saomah, A. (2017). Implikasi teori belajar terhadap pendidikan literasi. Medan: <http://repository.usu.ac.id>.
- Subrata, G. (2009). *Perpustakaan Digital*. Universitas Negri Malang.
- Syamsiah, S. (2018). Efektivitas Pengelolaan Perpustakaan sebagai Sarana Peningkatan Minat Membaca Peserta Didik di MTS Negeri 2 Kota Palu.
- Wahyu, S., & Muhsin, A. (2008). *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Oleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Di Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 121-138.